

## IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN SISWA DI DESA JEMOWO KABUPATEN BOYOLALI

Ari Yohana Pramesti<sup>1\*</sup>, Eni Rahmawati<sup>2</sup>

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

\*Corresponding author email: [ariyohana9@gmail.com](mailto:ariyohana9@gmail.com)

### Article History

Received: 25 April 2026

Revised: 23 May 2026

Published: 31 May 2026

### ABSTRACT

*This study analyzes the implementation of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH) in supporting students' education in Jemowo Village, Boyolali Regency. Previous studies on PKH have mainly discussed program effectiveness at a general level, while local studies that connect program implementation, mentoring practices, family behavior, and educational sustainability in rural settings remain limited. This study used a descriptive qualitative approach involving eight informants, consisting of one PKH facilitator, one village official, two parents from beneficiary families, three student beneficiaries, and one school representative. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation. The data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana model, which includes data condensation, data display, and conclusion drawing. Data credibility was strengthened through source triangulation, method triangulation, and member checking. The findings show that PKH implementation in Jemowo Village has been carried out through DTKS-based data validation, non-cash aid distribution through the Family Welfare Card, Family Capacity Building Meetings, home visits, and school attendance monitoring. PKH assistance helps reduce educational expenses, strengthens parents' awareness of schooling, improves students' learning motivation, and supports student attendance. However, the assistance has not fully covered all educational needs because educational sustainability is also influenced by parental awareness, household economic pressure, and the learning environment. The novelty of this study lies in its contextual analysis of PKH implementation at the village level by integrating policy implementation, mentoring, and educational behavior of beneficiary families.*

**Keywords:** Program Keluarga Harapan, Education, Beneficiary Families, Student Attendance, Jemowo Village.

Copyright © 2026, The Author(s).

**How to cite:** Pramesti, A. Y., & Eni Rahmawati. (2026). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menunjang Pendidikan Siswa Di Desa Jemowo Kabupaten Boyolali. *NUSRA : Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 7(2), 935–943. <https://doi.org/10.55681/nusra.v7i2.6208>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Melalui pendidikan, anak-anak dari keluarga prasejahtera memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuan akademik, sosial, dan keterampilan hidup yang diperlukan dalam menghadapi perubahan sosial ekonomi. Akan tetapi, akses pendidikan belum sepenuhnya merata karena sebagian keluarga masih menghadapi hambatan biaya, jarak, keterbatasan fasilitas, serta rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya keberlanjutan sekolah anak (Agusman, 2019; Nurokhmah, 2021).

Program Keluarga Harapan (PKH) hadir sebagai salah satu kebijakan perlindungan sosial berbasis bantuan tunai bersyarat. Program ini bertujuan membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mampu mengakses layanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam bidang pendidikan, PKH tidak hanya dimaksudkan untuk meringankan beban pengeluaran keluarga, tetapi juga mendorong perubahan perilaku keluarga agar anak tetap hadir di sekolah dan tidak mengalami putus sekolah (Wardani et al., 2023; Rosyidi & Hadi, 2023).

Secara regulatif, pelaksanaan PKH didasarkan pada kebijakan penanganan fakir miskin dan diperkuat melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penerima bantuan memiliki kewajiban untuk memenuhi komitmen pendidikan, seperti memastikan anak usia sekolah terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, keberhasilan PKH tidak cukup diukur dari tersalurkannya bantuan, tetapi juga dari

sejauh mana bantuan tersebut mampu menunjang keberlangsungan pendidikan anak.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan, mendorong partisipasi pendidikan, dan mengurangi beban ekonomi keluarga (Bela, 2024; Biyanri & Artati, 2024; Martsha, 2024; Rosdiana, 2023). Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menempatkan PKH dalam konteks desa, menghubungkan mekanisme pelaksanaan, praktik pendampingan, penggunaan bantuan oleh keluarga, serta dampaknya terhadap keberlanjutan pendidikan siswa masih perlu diperkuat. Dengan kata lain, masih terdapat celah kajian mengenai bagaimana PKH bekerja dalam kehidupan sehari-hari keluarga penerima manfaat, khususnya pada wilayah pedesaan yang memiliki kondisi sosial ekonomi dan budaya yang khas.

Desa Jemowo, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali, menjadi konteks penting untuk dikaji karena desa ini memiliki 182 penerima manfaat PKH yang tersebar pada komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa PKH memiliki peran strategis dalam mendukung kualitas hidup masyarakat, terutama bagi keluarga yang memiliki anak usia sekolah. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami apakah bantuan yang diberikan benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan, bagaimana pendampingan dilakukan, serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberlanjutan pendidikan siswa.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi PKH di tingkat desa dengan menekankan hubungan antara tata

kelola program, pendampingan keluarga, pemanfaatan bantuan, dan keberlangsungan pendidikan siswa. Penelitian ini tidak hanya melihat PKH sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan keluarga yang dapat membentuk kesadaran orang tua, meningkatkan motivasi belajar siswa, serta memperkuat sinergi antara keluarga, sekolah, pendamping PKH, dan pemerintah desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PKH dalam menunjang pendidikan siswa di Desa Jemowo serta mengidentifikasi dampak, hambatan, dan rekomendasi penguatan program dalam mendukung keberlanjutan pendidikan siswa penerima manfaat.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam konteks kehidupan keluarga penerima manfaat, bukan sekadar mengukur program melalui angka statistik. Fokus penelitian diarahkan pada proses implementasi, pemanfaatan bantuan, pendampingan, serta dampak program terhadap keberlangsungan pendidikan siswa di Desa Jemowo, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali.

Informan penelitian berjumlah delapan orang yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan mereka secara langsung dengan pelaksanaan PKH dan pendidikan siswa penerima manfaat. Informan terdiri atas satu pendamping PKH, satu perangkat desa, dua orang tua KPM, tiga siswa penerima manfaat, dan satu perwakilan sekolah. Komposisi informan

tersebut digunakan agar data yang diperoleh mencerminkan pandangan dari pihak pelaksana program, keluarga penerima, siswa, dan lembaga pendidikan.

**Tabel 1. Komposisi informan penelitian**

Kode informan	Kategori informan	Jumlah	Pertimbangan pemilihan
PPKH-1	Pendamping PKH	1	Memahami mekanisme pendataan, penyaluran, P2K2, dan monitoring komitmen pendidikan.
PD-1	Perangkat desa	1	Memahami kondisi sosial ekonomi desa dan proses validasi data penerima manfaat.
KPM-1 dan KPM-2	Orang tua KPM	2	Memiliki anak usia sekolah dan menggunakan bantuan PKH untuk kebutuhan pendidikan.
S-1, S-2, dan S-3	Siswa penerima manfaat	3	Mengalami langsung dampak bantuan terhadap kebutuhan sekolah dan motivasi belajar.
SK-1	Perwakilan sekolah	1	Mengetahui kehadiran dan perkembangan pendidikan siswa penerima PKH.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan

dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat proses pelaksanaan PKH, interaksi pendamping dengan KPM, dan kondisi pendidikan siswa penerima manfaat. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman informan dalam pelaksanaan program, penggunaan bantuan, kendala pendidikan, dan bentuk pendampingan yang diterima. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data lapangan, seperti dokumen program, catatan kegiatan, dan bukti pendukung terkait pelaksanaan PKH.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang mencakup tiga tahap: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Kondensasi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik dan tabel ringkasan temuan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan memeriksa keterkaitan antara hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Uji kredibilitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pendamping PKH, perangkat desa, orang tua KPM, siswa, dan pihak sekolah. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti melakukan member checking secara terbatas kepada informan kunci untuk memastikan bahwa interpretasi data tidak keluar dari konteks pengalaman informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi PKH dalam Menunjang Pendidikan Siswa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Desa Jemowo telah berjalan melalui mekanisme yang relatif terstruktur. Mekanisme tersebut meliputi pendataan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), verifikasi dan validasi data, penyaluran bantuan secara non-tunai, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), kunjungan rumah, serta pemantauan komitmen pendidikan siswa. Pelaksanaan program tidak hanya bertumpu pada distribusi bantuan, tetapi juga pada peran pendamping dalam membangun komunikasi dengan keluarga, sekolah, dan pemerintah desa.

Pendamping PKH menjelaskan bahwa pemantauan pendidikan dilakukan secara berkala agar bantuan tidak hanya diterima, tetapi juga dimanfaatkan sesuai tujuan program. Salah satu informan pendamping menyampaikan, "Kami tidak hanya mendampingi pencairan bantuan, tetapi juga mengingatkan keluarga agar anak tetap sekolah dan kebutuhan pendidikannya diprioritaskan" (PPKH-1). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendamping memiliki peran edukatif, bukan sekadar administratif.

Dari sisi keluarga penerima manfaat, bantuan PKH dipandang sebagai dukungan penting untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Seorang orang tua penerima manfaat menyatakan, "Kalau ada bantuan, biasanya saya dahulukan untuk kebutuhan sekolah anak, seperti buku, seragam, dan biaya harian ke sekolah" (KPM-1). Kutipan ini memperlihatkan bahwa bantuan mendorong keluarga untuk mengalokasikan dana pada kebutuhan pendidikan, meskipun dalam praktiknya sebagian keluarga masih harus membagi bantuan dengan kebutuhan rumah tangga lain yang mendesak.

Perangkat desa juga menilai bahwa koordinasi antara pendamping PKH dan pemerintah desa membantu menjaga ketepatan sasaran penerima. Informan dari unsur pemerintah desa menyampaikan, "Data penerima perlu terus diperbarui karena kondisi ekonomi warga bisa berubah. Musyawarah desa membantu memastikan bantuan diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan" (PD-1). Temuan ini menunjukkan bahwa validasi data menjadi aspek penting agar pelaksanaan program tetap adil dan sesuai kebutuhan masyarakat.

**Tabel 2. Ringkasan implementasi PKH dalam bidang pendidikan di Desa Jemowo**

Aspek implementasi	Temuan lapangan	Makna bagi pendidikan siswa
Pendataan dan validasi	Mengacu pada DTKS dan diperbarui melalui koordinasi desa, pendamping, dan pihak terkait.	Membantu memastikan bantuan diterima oleh keluarga yang memiliki kebutuhan pendidikan.
Penyaluran bantuan	Dilakukan secara non-tunai melalui KKS dan dicairkan secara berkala.	Memberikan dukungan finansial untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak.
P2K2 dan home visit	Pendamping memberikan edukasi dan memantau kendala keluarga.	Mendorong orang tua memprioritaskan pendidikan anak.

Monitoring sekolah	Pendamping berkoordinasi dengan sekolah terkait kehadiran dan perkembangan siswa.	Mencegah risiko ketidakhadiran berkepanjangan dan putus sekolah.
--------------------	---	--

Jika dianalisis melalui perspektif implementasi kebijakan, pelaksanaan PKH di Desa Jemowo dipengaruhi oleh empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pada aspek komunikasi, forum P2K2 dan kunjungan rumah menjadi ruang penting untuk menerjemahkan aturan program ke dalam pemahaman yang lebih mudah diterima oleh keluarga. Komunikasi yang bersifat dialogis membuat KPM tidak hanya mengetahui kewajiban administratif, tetapi juga memahami makna pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi anak.

Pada aspek sumber daya, pendamping PKH berperan sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan realitas sosial keluarga penerima manfaat. Peran ini penting karena keluarga prasejahtera tidak selalu memiliki pemahaman yang sama mengenai prioritas pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya dana bantuan, tetapi juga oleh kualitas pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan (Biyandri & Artati, 2024; Wahyudi, 2024).

Pada aspek disposisi, komitmen pendamping dan respons keluarga menjadi faktor yang menentukan efektivitas program. KPM yang memiliki kesadaran pendidikan lebih baik cenderung menggunakan bantuan untuk kebutuhan sekolah anak. Sebaliknya, keluarga yang masih menghadapi tekanan ekonomi berat terkadang memanfaatkan sebagian bantuan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan tunai bersyarat memerlukan pendampingan edukatif agar fungsi pendidikan program tetap terjaga.

Pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan PKH terbantu oleh adanya alur kerja yang jelas mulai dari pendataan, validasi, penyaluran, hingga monitoring komitmen. Namun, struktur tersebut perlu terus diperkuat melalui pembaruan data, koordinasi antarlembaga, dan keterlibatan sekolah dalam memantau kehadiran siswa. Dengan demikian, PKH dapat berjalan tidak hanya sebagai bantuan sosial, tetapi sebagai kebijakan pendidikan keluarga yang mendukung keberlanjutan sekolah anak.

#### **Dampak Bantuan PKH terhadap Keberlangsungan Pendidikan**

Bantuan PKH memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan pendidikan siswa, terutama dalam mengurangi beban biaya pendidikan. Bantuan tersebut digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah, buku, seragam, alat tulis, transportasi, dan kebutuhan pendukung lainnya. Meskipun jumlah bantuan belum mampu menutup seluruh biaya pendidikan, keberadaannya membantu keluarga mempertahankan anak agar tetap bersekolah.

Dari perspektif siswa, bantuan PKH berkontribusi pada rasa aman dan motivasi belajar. Salah seorang siswa penerima manfaat menyatakan, "Saya jadi lebih tenang karena perlengkapan sekolah bisa dibeli, jadi tidak terlalu khawatir kalau ada kebutuhan sekolah" (S-2). Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa bantuan PKH tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis siswa dalam mengikuti pembelajaran.

Perwakilan sekolah menyampaikan bahwa bantuan sosial bersyarat dapat membantu menjaga kehadiran siswa, terutama ketika sekolah dan pendamping PKH saling berkomunikasi. Informan sekolah menjelaskan, "Ketika ada siswa yang mulai sering tidak masuk, biasanya kami berkoordinasi dengan orang tua atau pendamping agar penyebabnya bisa diketahui lebih awal" (SK-1). Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan siswa penerima PKH memerlukan kerja sama antara keluarga, sekolah, dan pendamping.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rosdiana (2023) dan Martsha (2024), yang menunjukkan bahwa bantuan sosial bersyarat dapat meningkatkan partisipasi pendidikan anak dari keluarga prasejahtera. Namun, hasil penelitian di Desa Jemowo juga memperlihatkan bahwa bantuan finansial tidak cukup menjadi satu-satunya penentu keberhasilan pendidikan. Faktor non-ekonomi, seperti kesadaran orang tua, pola asuh, lingkungan belajar di rumah, dan dukungan sekolah, turut menentukan keberlangsungan pendidikan siswa (Maulia & Rusli, 2024).

Dengan demikian, dampak PKH terhadap pendidikan bersifat multidimensional. Pada dimensi ekonomi, PKH mengurangi beban pengeluaran keluarga. Pada dimensi sosial, PKH mendorong keluarga untuk lebih memperhatikan pendidikan anak. Pada dimensi psikologis, PKH memberi rasa aman bagi siswa. Pada dimensi kelembagaan, PKH memperkuat kebutuhan koordinasi antara pendamping, sekolah, dan pemerintah desa.

**Tabel 3. Dampak PKH terhadap pendidikan siswa**

Dimensi dampak	Bentuk dampak	Keterangan
Ekonomi	Mengurangi beban biaya pendidikan	Bantuan digunakan untuk membeli buku, alat tulis, seragam, transportasi, dan kebutuhan sekolah lainnya.
Sosial	Meningkatkan perhatian keluarga terhadap sekolah anak	Keluarga lebih terdorong memprioritaskan pendidikan karena bantuan terkait dengan komitmen sekolah.
Psikologis	Meningkatkan rasa aman dan motivasi siswa	Siswa merasa lebih percaya diri karena kebutuhan sekolah lebih terdukung.
Kelembagaan	Mendorong koordinasi sekolah, pendamping, dan desa	Monitoring kehadiran membutuhkan komunikasi antarpihak secara lebih konsisten.

### Faktor Penghambat Pelaksanaan PKH dalam Pendidikan

Meskipun pelaksanaan PKH menunjukkan dampak positif, penelitian ini menemukan beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Pertama, nominal bantuan belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan, terutama bagi siswa pada jenjang pendidikan menengah yang membutuhkan biaya lebih besar. Kedua, masih terdapat keluarga yang belum memiliki perencanaan penggunaan dana secara baik, sehingga bantuan

pendidikan berpotensi bercampur dengan kebutuhan konsumsi harian.

Ketiga, kesadaran sebagian orang tua terhadap pentingnya pendidikan masih perlu ditingkatkan. Bantuan tunai bersyarat dapat mendorong anak hadir di sekolah, tetapi keberhasilan belajar memerlukan perhatian orang tua dalam bentuk pengawasan, dukungan belajar di rumah, dan komunikasi dengan sekolah. Keempat, keterbatasan fasilitas pendidikan dan kondisi sosial ekonomi keluarga tetap menjadi faktor yang dapat menghambat pencapaian tujuan program. Hambatan ini menunjukkan bahwa PKH perlu diperkuat melalui pendekatan lintas sektor, bukan hanya melalui penyaluran bantuan.

### Implikasi Praktis dan Rekomendasi Kebijakan

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi praktis. Pertama, pemerintah desa perlu memperkuat koordinasi dengan pendamping PKH dan sekolah melalui forum pemantauan pendidikan anak KPM. Forum tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kehadiran siswa, kebutuhan pendidikan, dan masalah keluarga yang berpotensi mengganggu keberlangsungan sekolah.

Kedua, pendamping PKH perlu memperkuat materi P2K2 yang berkaitan dengan perencanaan keuangan keluarga dan prioritas pendidikan anak. Materi tersebut penting agar keluarga mampu membedakan kebutuhan mendesak dengan kebutuhan strategis jangka panjang. Ketiga, sekolah perlu dilibatkan secara lebih aktif dalam memberikan data kehadiran dan perkembangan siswa penerima PKH sehingga pendamping dapat melakukan intervensi lebih cepat ketika terdapat tanda-tanda penurunan partisipasi belajar.

Keempat, pemerintah daerah perlu mengembangkan sinergi antara PKH dengan program pendidikan lain, seperti bantuan perlengkapan sekolah, beasiswa daerah, layanan transportasi siswa, atau program pendampingan belajar. Sinergi ini diperlukan karena PKH belum mampu menutup seluruh kebutuhan pendidikan siswa. Kelima, keluarga penerima manfaat perlu didorong untuk memandang bantuan PKH sebagai sarana penguatan pendidikan anak, bukan sekadar tambahan pendapatan rumah tangga.

**Tabel 4. Rekomendasi penguatan PKH dalam menunjang pendidikan**

Pihak terkait	Rekomendasi
Pemerintah desa	Memperkuat pembaruan data KPM, memfasilitasi koordinasi rutin dengan pendamping dan sekolah, serta mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan dukungan pendidikan tambahan.
Pendamping PKH	Mengintensifkan P2K2, home visit, dan edukasi perencanaan keuangan keluarga agar bantuan lebih terarah pada kebutuhan pendidikan.
Sekolah	Memberikan informasi kehadiran dan perkembangan siswa penerima PKH kepada pendamping secara berkala.
Keluarga penerima manfaat	Memprioritaskan penggunaan bantuan untuk kebutuhan pendidikan anak dan membangun kebiasaan belajar di rumah.
Pemerintah daerah	Mengintegrasikan PKH dengan beasiswa daerah, bantuan perlengkapan sekolah, dan program pendampingan belajar.

## KESIMPULAN

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Jemowo telah berjalan melalui mekanisme pendataan berbasis DTKS, penyaluran bantuan non-tunai melalui KKS, pelaksanaan P2K2, kunjungan rumah, serta monitoring komitmen pendidikan siswa. Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa PKH berperan penting dalam menunjang pendidikan siswa dari keluarga prasejahtera, terutama melalui pengurangan beban biaya sekolah, peningkatan motivasi belajar, dan penguatan kehadiran siswa di sekolah.

Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa keberhasilan PKH di tingkat desa tidak hanya ditentukan oleh kelancaran penyaluran bantuan, tetapi juga oleh kualitas pendampingan, kesadaran keluarga, komunikasi dengan sekolah, dan dukungan pemerintah desa. Dengan demikian, PKH perlu dipahami sebagai kebijakan perlindungan sosial sekaligus instrumen pendidikan keluarga. Agar manfaatnya lebih berkelanjutan, pemerintah desa perlu memperkuat pembaruan data dan koordinasi lintas pihak, pendamping PKH perlu meningkatkan edukasi keluarga melalui P2K2, dan sekolah perlu terlibat dalam pemantauan kehadiran serta perkembangan siswa penerima manfaat. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan cakupan informan yang lebih luas atau pendekatan campuran agar dampak PKH terhadap capaian belajar siswa dapat dikaji secara lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

Agusman, Y. (2019). Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 105-113.

- Bela, S. (2024). Analisis penggunaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pesanggrahan Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 8, 10684-10693.
- Biyandri, A., & Artati, Y. (2024). Efektivitas bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat. *Journal of Economic and Social*, 3(2), 47-57. <https://doi.org/10.56959/jesfa.v3i2.95>
- Hidayati, R., Febrian, A., Joni, Y., & Fauzan, R. (2025). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya peningkatan pendidikan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 9, 30644-30651.
- Martsha, F. (2024). Pengaruh bantuan sosial bersyarat Program Keluarga Harapan terhadap partisipasi pendidikan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, 6, 105-118.
- Maulia, P., & Rusli, Z. (2024). Efektivitas pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Marpoyan Damai. *Jurnal Administrasi Publik*, 8, 49970-49975.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mulyana, A. V. C. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Widina Media Utama.
- Nurokhmah. (2021). Program Indonesia Pintar (PIP): Implementasi kebijakan kesejahteraan dalam upaya meningkatkan angka partisipasi pendidikan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 2(1), 37-48.
- Prasetyo, B. (2024). Evaluasi dampak bantuan tunai bersyarat terhadap motivasi belajar siswa di daerah pedesaan. *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*, 12(2), 245-260.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Kementerian Sosial RI.
- Rosdiana, R. A. (2023). Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap keberlangsungan pendidikan anak keluarga prasejahtera. *Jurnal Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 15-24.
- Rosyidi, A. Z., Muliadi, M., Hadi, M. W., & Alawiya, R. (2023). Students' perception of using scavenger hunt game in understanding social context of second language acquisition. *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, 4(2), 243-250.
- Salamah, H. (2025). Peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Kecamatan Dramaga. *Jurnal Pemberdayaan Sosial*, 5(2).
- Wahyudi, A. (2024). Kontribusi pelatihan pendamping sosial PKH di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 173-189.
- Wardani, W. A., Ismail, M., & Kurniawansyah, E. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8, 2189-2196. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i4.1706>